

MATURITY ANALYSIS: SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (Studi Kasus : Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Tahun 2018)

**Merry Saurina Manik^{1st} ; Dr. Nursanita, SE.,Ak., RE.,CSR^{2nd} ;
Dr. Drs. Harry Indradjit,SE.,Ak.,MM.,CA^{3th}
Magister Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Jakarta, Indonesia**

merrymanik@yahoo.com; nursanita1@gmail.com; harryindradjit@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Tahun 2018. Penilaian Maturitas SPIP mencakup 5 (lima) unsur yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan. Kelima unsur ini selanjutnya dirinci dalam 25 Sub Unsur.

Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder berupa dokumen kebijakan, aturan aturan dan *Standard Operating Procedures* (SOP) di Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Tahun 2018. Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Maturity Analysis* yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Tahun 2018 telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan capaian kategori “Berkembang” pada skor 2,770 yang artinya penerapan praktik pengendalian intern telah dijalankan namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada inisiatif individu. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

**Kata Kunci: Penilaian Maturitas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.**

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2016 disebutkan pemeriksaan atas pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran (TA) 2012-2015 yang dilaksanakan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat dan 14 kantor regional BKN di daerah. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS untuk periode tahun 2012-2015 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, khususnya terkait dengan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI), yaitu *Standard Operating Procedure (SOP)* belum disusun/ tidak lengkap, SOP belum berjalan optimal, serta sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.

Permasalahan di atas mengakibatkan pengangkatan CPNS dari tenaga honorer yang tidak sah serta pengambilan keputusan terkait dengan tenaga honorer tidak akurat.

Badan Kepegawaian Negara yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah menyelenggarakan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil setiap tahunnya, tentunya diharapkan memiliki system pengendalian intern yang baik sehingga penyelenggaraan **seleksi CPNS** yang diharapkan akan dilakukan dengan prinsip-prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih **dari** praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan tidak dipungut biaya, baik selama proses **pendaftaran** hingga proses **seleksi** dan **penerimaan CPNS dapat terwujud.**

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh para peneliti dan akademisi sebelumnya mengenai pengendalian intern. Penelitian yang dilakukan oleh Kapoh, et. al. (2017) menyimpulkan bahwa (1) Secara umum sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara sudah baik, karena penerapannya telah dilakukan sesuai dengan unsur-unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, (2) Secara umum pencapaian sasaran strategis inspektorat kabupaten Minahasa Utara tahun 2016 sudah efektif, dan (3) Sistem dan prosedur yang ada di Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara sudah cukup memadai, serta ditunjang dengan pegawai-pegawai yang berkompeten sehingga membuat tingkat kesalahan yang signifikan atas pengendalian pengawasan dapat diatasi dengan cepat, namun jumlah pegawai di Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara belum ideal sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas belum sepenuhnya berjalan efisien.

Penelitian Winarni dan Kusuma (2017) menyimpulkan menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPPT) Kabupaten Sleman mampu memenuhi kriteria dalam mewujudkan akuntabilitas. Unsur dalam sistem pengendalian intern pemerintah saling mempengaruhi dan saling memiliki peran dalam mewujudkan akuntabilitas. Dari hasil analisis, hambatan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di DPMPPPT Kabupaten Sleman yaitu kurangnya sumber daya dana dan kurangnya pemahaman pegawai mengenai esensi sistem pengendalian intern pemerintah. Menghadapi hambatan tersebut, dilakukan perhatian yang lebih dalam pelaksanaan penganggaran sehingga tidak terjadi kekurangan anggaran ketika program terlaksana dan memberikan pemahaman lebih mengenai sistem pengendalian intern pemerintah kepada pegawai sehingga pegawai mampu memahami esensi dari sistem pengendalian intern pemerintah.

2.2. Landasan Theory

Grand Theory dalam penelitian ini adalah Teori Pengawasan, *Middle Theory*nya adalah Sistem Pengendalian Intern dan *Applied Theory*nya adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

2.2.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2.2.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan” Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.2.3.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Adapun tujuan dari SPIP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 (ayat 3), adalah :

- 1) Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,
- 2) Keandalan pelaporan keuangan,
- 3) Pengamanan aset negara, dan
- 4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

2.2.3.3 Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 3 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah terdiri atas unsur sebagai berikut :

- 1) Lingkungan Pengendalian
- 2) Kegiatan Pengendalian

- 3) Penilaian Risiko
- 4) Informasi dan Komunikasi
- 5) Pemantauan

2.2.4.2 Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Menurut Perka BPKP no 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tingkat maturitas atau kematangan SPIP menunjukkan kualitas proses pengendalian terintegrasi dalam pelaksanaan sehari-hari tindakan manajerial dan kegiatan teknis instansi pemerintah.

2.2.4.3 Fokus penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP

Fokus penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan variabel yang digunakan untuk menunjukkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPI. Variabel tersebut merupakan sub-sub unsur SPI di dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Terdapat 5 (lima) unsur dan 25 subunsur sebagai fokus penilaian. Hal ini dijelaskan lebih detail oleh gambar 2.2 fokus penilaian tingkat maturitas SPIP dibawah ini





Gambar 2.2
 Fokus Penilaian Tingkat Maturitas SPI
 Sumber : Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Strategi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif berupa study kasus pada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia periode Tahun 2018. Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2014:53) yaitu: “Suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen).” Data yang dihasilkan berupa angka-angka (kuantitatif) dan berupa paragraf penjelasan dari angka (kuantitatif) tersebut.

Sugiyono (2016:10-11) lebih menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif, yakni sebagai berikut: “Seperti telah dikemukakan, dalam metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme, realitas dipandang sebagai sesuatu yang kongkrit, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku, tidak berubah, dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian dalam penelitian kuantitatif, peneliti dapat menentukan hanya beberapa variabel saja dari obyek yang diteliti, dan kemudian dapat membuat instrumen untuk mengukurnya.”.

3.2 Data Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja yang ada di Badan Kepegawaian Negara RI. Adapun sampel penelitian menurut Sugiyono (2017:137) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini sampel penelitiannya adalah Inspektorat , Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara, Biro Umum dan Biro Keuangan dengan pertimbangan bahwa sampel penelitian ini dianggap telah mewakili kriteria fungsi dalam organisasi yang ingin diteliti, yaitu kriteria fungsi pengawasan yang diwakili oleh Inspektorat, kriteria fungsi teknis yang diwakili Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara dan kriteria administrasi yang diwakili oleh Biro Keuangan.

Metode pengambilan sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* sampling yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih *representative* (Sugiyono,2010).

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen pendukung yang didapat pada saat melakukan validasi penilaian maturitas sistem pengendalian intern pemerintah di BKN Tahun 2018. Dokumen-dokumen tersebut berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) atas Peraturan peraturan dan Kebijakan-kebijakan Kepala BKN, notulensi atau dokumen terkait yang menjelaskan SOP atau kebijakan tersebut telah disosialisasikan, dokumen pendukung yang menjelaskan bahwa SOP tersebut telah diimplementasikan dan dievaluasi secara berkala, dan aplikasi yang digunakan untuk memantau secara real time atas implementasi kebijakan/aturan tersebut.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari wawancara serta analisis dokumen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif karena penelitian ini bersifat menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara dengan cara menilai maturitas SPIP berdasarkan instrumen penilaian sebagaimana diatur pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Perka BPKP) Nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.3 Analisis Hasil Penelitian

Kemudian nilai pemenuhan dokumen tersebut di atas dimasukkan ke dalam tabel penilaian skor maturitas sebagai berikut:

. Tabel 4.27 Tabel Penilaian Skor Maturitas

Variabel/Dimensi		Bobot	Nilai Maturitas	Capaian Skor Maturitas
Lingkungan Pengendalian(X1)		30%		
1	Integritas dan Nilai Etika	3,75%	3	0,113
2	Komitmen terhadap Kompetensi	3,75%	3	0,113
3	Kepemimpinan Kondusif	3,75%	3	0,113
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	3,75%	4	0,150
5	Pendelegasian Wewenang	3,75%	3	0,113
6	Pembinaan SDM yang Sehat	3,75%	3	0,113
7	Peran APIP yang efektif	3,75%	2	0,075
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	3,75%	3	0,113
Penilaian Risiko(X2)		20%		
1	Identifikasi Risiko	10%	2	0,2000
2	Analisis Risiko	10%	2	0,2000
Kegiatan Pengendalian(X3)		25%		
1	Reviu Kinerja	2,27%	3	0,068
2	Pembinaan SDM	2,27%	3	0,068
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27%	3	0,068
4	Pengendalian Fisik atas aset	2,27%	3	0,068
5	Penetapan reviu indikator dan Indikator kinerja	2,27%	3	0,068

Variabel/Dimensi		Bobot	Nilai Maturitas	Capaian Skor Maturitas
6	Pemisahan Fungsi	2,27%	3	0,068
7	Otorisasi transaksi dan Kejadian Penting	2,27%	3	0,068
8	Pencatatan yang akurat dan tepat waktu	2,27%	4	0,091
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	2,27%	3	0,068
10	Akuntabilitas dan Pencatatan Sumber Daya	2,27%	4	0,091
11	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	2,27%	3	0,068
Informasi dan Komunikasi(X4)		10%		
1	Informasi	5%	3	0,150
2	Komunikasi yang efektif	5%	3	0,150
Pemantauan(X5)		15%		
1	Pemantauan berkelanjutan	7,5%	3	0,225
2	Evaluasi Terpisah	7,5%	2	0,150
Total Skor Maturitas				2,770

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penilaian maturitas SPIP di Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia tahun 2018 mencapai kategori “berkembang” dengan skor 2,770. Tingkat berkembang berarti Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh inisiatif individu. Keandalan SPIP berbeda dari satu unit kerja dengan unit lainnya. Efektivitas Pengendalian intern di BKN Republik Indonesia belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Hal ini dikarenakan terdapat 4 sub unsur/dimensi yang pencapaian nilai maturitasnya cukup rendah, yaitu perwujudan peran APIP, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi terpisah dimana masing masing sub unsur ini penilaian tingkat maturitasnya adalah 2, yakni kategori berkembang yang artinya penerapan sistem pengendalian internal telah berjalan baik untuk keempat unsur tersebut akan tetapi belum terdokumentasi dengan baik dan belum dilakukan evaluasi terhadap kebijakan terkait.

5.2. Saran

Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia harus berupaya meningkatkan tingkat kematangan SPIP nya dari Level 2 dengan kriteria berkembang menuju Level 3 dengan kriteria Terdefinisi. Perlu perbaikan atas sub unsur/dimensi yaitu

- a. Perwujudan Peran APIP,
- b. Identifikasi Risiko,
- c. Analisis Risiko
- d. Evaluasi Terpisah.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan Penelitian Selanjutnya

Penelitian tidak dilakukan di seluruh unit kerja BKN, hanya dilakukan di 4 (empat) unit kerja yang dianggap bisa mewakili fungsi organisasi dalam bidang teknis, pengawasan dan administrasi. Tidak semua dokumen bisa diakses dikarenakan ada beberapa dokumen yang terkait dengan kerahasiaan instansi. Dikarenakan keterbatasan akses ke instansi terkait dalam hal ini Ombusman, maka fenomena yang disajikan diambil dari artikel bebas yang disajikan dalam media harian surat kabar. Terkait penilaian pemenuhan indikator dalam hal keberadaan dokumen tidak bisa terlepas dari subjektivitas peneliti dikarenakan pertimbangan dari hasil pengamatan di lapangan.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian dengan menambahkan jumlah unit kerja yang dijadikan sampel dan meneliti Kementerian Lembaga lainnya, di samping itu agar referensi terkait sumber penelitian diupayakan diambil dari artikel ilmiah dari penelitian serupa

DAFTAR REFERENSI

- Andersen, E.S., and Jessen, S.A. 2003. *Project maturity in organizations, international journal of project management*, 21, hal 457-46
- Alfani, A., dan Firmansyah, A. 2019. Pengendalian Internal Pada Siklus Penerimaan Bea Masuk Untuk Kawasan Berikat (Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Bekasi. *Jurnal Perspektif Bea Cukai*. Vol 2. No 2.
- Alam, M.M., Said, J and Azis, M.A.A. 2017. *Assessment of the Practices of Internal Control System in the Public Sectors of Malaysia. Asia-Pacific Management Accounting Journal*, Vol. 10(1), pp. 43-62.
- Al-Thuneibat, A. A., Al-Rehaily, A. S., and Basodan, Y. A. 2015. *The impact of internal control requirements on profitability of Saudi shareholding companies. International Journal of Commerce and Management*, 25 (2), 196–217.
- Ashfaq Khurram and Rui Zhang.2019. *The effect of board and audit committee effectiveness on internal control disclosure under different regulatory environments in South Asia. Journal of Financial Reporting and Accounting* ISSN: 1985-2517.
- Ayagre, Philip. 2014. *The effectiveness of Internal Control Systems of banks: The case of Ghanaian banks. International Journal of Accounting and Financial Reporting*. Vol. 4, hal 377-389
- Chalmers, K., Hay, David and Khelif, Hichem. *Internal Control In Accounting Research: A Review. Journal of Accounting Literature*. Volume 42, June 2019, Pages 80-103.
- Chee Chong, H., Ramayaha,T and Subramaniam, C. 2018. *The relationship between critical success factors, internal control and safety performance in the Malaysian manufacturing sector.Safety Science* 104, 179-188.
- Channar, Z., Talreja, S. and Bai,M.2015. *Impact of human capital variables on the effectiveness of the organizations. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences (PJCSS) ISSN 2309-8619, Johar Education Society, Pakistan (JESPK), Lahore, Vol. 9, Iss. 1, pp. 228-240.*
- Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO). 2013. Internal Control – Integrated Framework. <http://www.coso.org/>. Di unduh tanggal 16 Juni 2015.*
- Chunli, L.,Bin, L and Wei, S.2017. *Employee quality, monitoring environment and internal control.China Journal of Accounting Research. Volume 10, Issue 1, March 2017, Pages 51-70.*

- C. Wright Mills.1959.*The Sociological Imagination* . [Oxford University Press](#).
- Dessler, Gary. 2009. Manajemen SDM buku 1. Jakarta : Indeks.
- Donelson, Dain C., Ege, Matthew S and McInnis, John .2017. [Internal Control Weaknesses and Financial Reporting Fraud](#). Auditing:A Journal of Practice & Theory.
Vol. 36, No. 3, pp. 45-69.
- Fangzun,Y., Luying,X., Junrui,Z and Wei,S.2018.*Political connections, internal control and firm value: Evidence from China's anti-corruption campaign*. [Journal of Business Research Volume 86](#), May 2018, Pages 53-67.
- Hasan, Iqbal. 2006. Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hao, Dong Yang., Qi ,Guo You and Wan, Jing. 2018. *Corporate Social Responsibility, Internal Controls, and Stock Price Crash Risk: The Chinese Stock Market*. Sustainability 2018, 10, 1675.
- Hoesada, Jan. 2016. Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2015. *Modul Chartered Accountant Sistem Informasi dan Pengendalian intern*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2016.
- Kadarisman, M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali
- Karagiorgos, Theofanis, Drogalas, George, Giovanis, Nikolaos. 2014. *Evaluation of the effectiveness of internal audit in Greek hotel business*. *International Journal of Economic Sciences and Applied Research*. Vol 4. hal 19-34
- Kapoh, Octaviani M, Ventje Ilat, Jessy D.L Warongan. 2017. Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2): 213-223.
- Karim, N., Abd Nawawi, A. S and Ahmad, S. A. P.2018. *Inventory control weaknesses – a case study of lubricant manufacturing company*. *Journal of Financial Crime*, 08 May 2018, Vol.25(2), pp.436-449
- Kawedar, W, Sodikin, Handayani, S dan Purwanto, A. 2019. *I Good Governance, Sistem Pengendalian Internal, dan Kinerja Keuangan Organisasi Sektor Publik*. *Jurnal Manajemen Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol 13 No 2.

- Kewo, Cecilia.L. 2017. *The Influence of Internal Control Implementation and Managerial Performance On Financial Accountability Local Government in Indonesia. International Journal of Economics and Financial Issues* , 7 (1) , 293-297 .
- Kim, Jeng-Bon.,Lee Jay Junghun., and Park, Jong Chool. 2019.*Internal Control Weakness and the Asymmetrical Behavior of Selling, General, and Administrative Costs.*Sage Journal.
- Kinyua, J., Gakure, R., Gekara, M and Orwa, G.2015. *Effect of Internal Control Environment on the Financial Performance of Companies Quoted in the Nairobi Securities Exchange. International Journal of Innovative Finance and Economics Research* 3. Vol 4. hal 29-48
- Kulikova, L.I and Satdarova.D.R. 2016. *Internal control and compliance-controls effective methods of management, detection and prevention of financial statement fraud. Academy of Strategic Management Journal*
- Kusuma,R.P dan Winarni,F. 2017.Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman
- Nguyen,T and Duong,N.H. 2015. *A Theoretical Model Studying The Impact Of Internal Control On Performance And Risks Of Vietnam Commercial Banks. International Conference on Accounting, ICOA 2015, Danang, Vietnam.*
- Madesen,P.M., Karamoy, H and Lambey,L.2018. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auiditing.*
- Mardian, Sepky., Nissa, Izzatun dan Nasution, Nursanita.2019.*The Determination Of Sharia Governance On Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) In Depok City. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol 5, No 2.*
- Merton, Robert. 1957.*Social Theory and Social Structure.*
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi.* Jakarta: Salemba Empat.
- Munaiseche,C.V., Ilat, V dan Lambey, R. 2018. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Dan Penerimaan Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 875-883.
- Nazir, Mohammad,Ph.D.(2011). *Metode Penelitian.* Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Oussii,Ahmed Atef and Taktak, Nelia Boulila. 2018.*The impact of internal audit function characteristics on internal control quality.* [Managerial Auditing Journal](#) ISSN: 0268-6902
- Paneo, Fitrianti., Sondakh, Julie dan Morasa, Jenny. 2017. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Kabupaten Gorontalo. [ejournal.unsrat.ac.id](#).
- Pujiono, Dodik Slamet., Sukarno,Hari dan Puspitasari,Novi.2016. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Di Provinsi Maluku Utara). *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 10, No 1. Hal. 68 – 81.
- Purba, Rahima., Umar, Haryono dan Pramana, Silvia.2019. Minimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Peran Dan Fungsi SPIP di Dinas Pendapatan Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik.* Vol 10 No 1 (2019).
- Rahim, S. A.,Nawawi, A and Salin, P.A. 2017. *Internal control weaknesses in a cooperative body: Malaysian experience.* [International Journal of Management Practice](#), *Inderscience Enterprises Ltd*, vol. 10(2), pages 131-151.
- Robbins, Stephen, 2006, “Perilaku Organisasi”, Prentice Hall, edisi kesepuluh Sabardini, 2006, “Peningkatan Kinerja Melalui Perilaku Kerja Berdasarkan Kecerdasan Emosional”, *Telaah Bisnis*, Vol.7, No.1.
- Rondonuwu, Sintje dan Soeda, E.B. 2018. *Ipteks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara.* *Jurnal IPTEKS akuntansi bagi masyarakat.*
- R.Terry, George. Prinsip- Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Sari, Dicka Bella Murtika., Wiyanti, Anita dan Masitoh, Endang.2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. [IENACO \(Industrial Engineering National Conference\) 2017.](#)
- Siagian, P. Sondang. 2005. *Fungsi-fungsi Manajemen.* Jakarta: Bumi Aksara
- Sondole, Erlis Milta Rin dkk. 2015. Pengaruh disiplin kerja, motivasi dan pengawasan terhadap kinerja karyawan pada PT. Pertamina (Persero) unit pemasaran VII Pertamina BBM Bitung. *Jurnal EMBA.* 3:652.
- Soedaryono.2000.Tata Laksana Kantor.Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Taylor. Frederick Winslow, "*The Principles of Scientific Management*", New York: Cosimo, 2006.
- Wei,S., Ying, C and Bing,L .2018. *Does corporate integrity improve the quality of internal control?. China Journal of Accounting Research* 407-427.
- Winarni, F dan Kusuma, R. 2017. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman. *journal.student.uny.ac.id*.
- Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Yasmin,Y. 2018. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Pengukuran Kinerja Pemerintahan Di Kabupaten Bandung.*Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*. Vol 4 No 1.
- Yuniarti, R dan Ariandi, I. 2017. *The effect of internal control and anti-fraud awareness on fraud prevention (A survey on inter-governmental organizations. Jurnal of Economics. Business and Accountancy*. Vol. 5. hal 128-137.
- Quentin Skinner, ed.1985. *The Return of Grand Theory in the Human Sciences*.Cambridge University Press.
- [Zakaria, K. M., Nawawi, A](#) and Salin, Ahmad S. A. P.2016. *Internal controls and fraud – empirical evidence from oil and gas company*. *Journal of Financial Crime*, 03 October 2016, Vol.23(4), pp.1154-11.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Undang-undang No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.

Undang Undang Republik Indonesia 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

Instruksi Presiden No.15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/46/M.Pan/4/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.